

**HAMBATAN KETERPILIHAN PEREMPUAN DALAM POLITIK LOKAL:
ANALISIS KEGAGALAN ENDANG KUSUMAWATY DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2018**

Ariq Abrar Assidqi

NPP. 31.0255

Asdaf Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: ariqcepres@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Teguh Ilham, S.STP, M.Arts

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Based on Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights (HAM) Article 43 paragraph (1) which states that "every citizen has the right to be elected and to vote in general elections based on equality of rights through direct, general, free, secret, honest, and fair voting as stipulated in the regulations". This signifies that both men and women have equal opportunities in an election. However, the fact remains that until now, no woman has ever been elected as mayor. Despite several attempts by women to participate in the local leadership contest in Pangkalpinang City. **Purpose:** This study aims to understand the process of women's candidacy for regional heads and the obstacles to their election in the Pangkalpinang City Election 2018. **Method:** In this research, the researcher used a qualitative research method focused on a descriptive approach. **Result/Findings:** Based on the findings of the study conducted on this research, it can be known that there are 3 obstacles that hinder the election of women, in this case, Endang Kusumawaty, in the Pangkalpinang City Election 2018. Firstly, the candidate for mayor, a woman, is still relatively unknown to the people of Pangkalpinang. Secondly, the patriarchal culture and the prevalence of money politics still exist in some segments of Pangkalpinang society. Thirdly, the financial strength of the Endang Kusumawaty-Ismiryadi team is considered insufficient. When these three obstacles are combined, they become significant barriers that halt the journey of Endang Kusumawaty-Ismiryadi in the Pangkalpinang City regional leadership contest. **Conclusions:** To overcome the barriers to the electability of women in Pangkalpinang City, several steps can be taken for both female candidates and political parties. Female candidates need to highlight issues related to women, while political parties can enhance political education for their female cadres as well as the general public.

Keywords: Candidate nomination process, Election obstacles, Regional Head Election

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan bahwa "setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak

melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Ini menandakan baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama dalam sebuah pemilihan. Tetapi, faktanya hingga saat ini, perempuan belum pernah terpilih sebagai walikota. Padahal, sudah beberapa kali perempuan mencoba untuk mengikuti kontestasi kepala daerah di Kota Pangkalpinang. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan mengetahui proses kandidasi perempuan menjadi kepala daerah dan hambatan keterpilihannya pada Pilkada Pangkalpinang 2018. **Metode:** Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang difokuskan pada pendekatan deskriptif. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan terhadap penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat 3 hambatan yang menghambat terpilihnya perempuan, dalam kasus ini adalah Endang Kusumawaty, dalam Pilkada Pangkalpinang 2018. Pertama, masih kurang dikenalnya calon walikota perempuan tersebut oleh masyarakat Pangkalpinang. Kedua, budaya patriarki dan politik uang yang masih melekat pada sebagian masyarakat Pangkalpinang. Ketiga, kekuatan finansial tim Endang Kusumawaty-Ismiryadi yang dinilai masih kurang. Dari ketiga hambatan ini, ketika digabungkan menjadi hambatan besar yang membuat perjalanan Endang Kusumawaty-Ismiryadi di kontestasi kepala daerah Kota Pangkalpinang terhenti. **Kesimpulan:** Untuk mengatasi hambatan keterpilihan perempuan di Kota Pangkalpinang, diperlukan beberapa Langkah yang dapat dilakukan baik kepada calon perempuan maupun partai politik. Calon perempuan perlu mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan perempuan serta partai politik juga dapat meningkatkan pendidikan politik baik kepada kader perempuan mereka maupun masyarakat.

Kata kunci: Proses Kandidasi, Hambatan Keterpilihan, Pilkada.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap Warga Negara Indonesia berhak untuk memilih pilihannya sendiri secara bebas tanpa paksaan siapapun dan untuk dipilih oleh warga lainnya sebagai calon dalam pemilihan umum apapun yang berlangsung. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Maka dari itu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk dapat dipilih sebagai pemimpin baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pada tingkat pusat, dari ke-tujuh presiden yang pernah menjabat, sudah ada wakil dari perempuan yang menjabat sebagai presiden yaitu Ibu Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri walaupun pada saat itu pemilihan belum dilakukan secara langsung. Ibu Megawati pun sempat mencalonkan diri lagi pada PEMILU 2004, namun kalah dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono.

Di Kota Pangkalpinang, sepak terjang perempuan pada kontestasi politik pada perebutan kekuasaan kepala daerah masih belum terlihat karena hingga saat ini, perempuan belum pernah terpilih sebagai kepala daerah di Kota Pangkalpinang. Perempuan bukannya tidak berpartisipasi dalam kontestasi kepala daerah di Kota Pangkalpinang, tetapi memang calon perempuan belum pernah memenangkan kontestasi kepala daerah Kota Pangkalpinang.

Pada tahun 2008 terdapat calon walikota perempuan yaitu Ibu Fifi Lety Indra yang berpasangan dengan Bapak Yugo Saldian yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pada PILWAKO tersebut pun calon perempuan kalah dan dimenangkan oleh calon petahana yaitu Bapak Zulkarnain Karim berpasangan dengan Bapak Malikul Amjad yang diusung oleh Partai Demokrat. Selain itu juga, pada periode berikutnya yaitu pada PILWAKO 2013 tidak ada satupun Calon Walikota yang merupakan perempuan. Hanya Ibu Nursaadah yang berpartisipasi dalam PILWAKO tersebut dan mencalonkan sebagai calon wakil walikota, bukan sebagai calon walikota. Pasangan Naziarto-Nursaadah pun berangkat dari jalur perorangan, bukan diusung oleh partai politik. Pada PILWAKO ini pun dimenangkan oleh pasangan calon Irwansyah-Sopian dengan melalui dua putaran pemilihan. Pasangan yang melaju ke putaran kedua pun tidak terdapat perempuan yaitu pasangan Saparudin-Maulan Aklil. Pasangan calon Irwansyah-Sopian menang dengan total suara 35.399 berbanding dengan pasangan calon Saparudin-Maulan Aklil dengan total suara 31.942 dengan daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 139.502. Partisipasi pemilih pada putaran pertama hanya 47,76% dan pada putaran kedua sebanyak 50,35% dari DPT yang ada (Aprionis, 2013).

Pada PILWAKO 2018, ada calon walikota perempuan yaitu Endang Kusumawaty yang berpasangan dengan Ismiryadi. Pada pemilihan itupun, calon perempuan hanya menempati posisi ketiga dari empat pasangan calon yang berkontestasi pada pemilihan tersebut. Padahal, Endang Kusumawaty memiliki kursi terbanyak di parlemen yaitu sebanyak 11 kursi. Posisi kedua saja yaitu pasangan Saparudin-Edison hanya memiliki 8 kursi di parlemen bahkan pemenang PILWAKO 2018, Maulan Aklil-Muhammad Sopian, hanya memiliki 7 kursi di parlemen.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk dipilih. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Maka dari itu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk dapat dipilih sebagai pemimpin baik di tingkat pusat maupun daerah.

Tetapi faktanya di Pangkalpinang, perempuan belum pernah terpilih sebagai kepala daerah. Padahal sudah ada usaha dari beberapa perempuan untuk ikut berkontestasi pada Pilkada Kota Pangkalpinang contohnya pada tahun 2008, 2013 (hanya sebagai calon wakil walikota) dan 2018.

Pada 2018, calon walikotnya adalah Endang Kusumawaty dan didukung oleh 4 partai dengan total 11 kursi di parlemen. Kursi terbanyak yang dimiliki oleh pasangan calon. Tetapi, hanya menempati posisi ke 3 pada pemilihan tersebut, bahkan yang memenangkan kontestasi tersebut hanya didukung oleh 7 kursi.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian sebelumnya. terkait perempuan dalam kontestasi politik baik pada eksekutif maupun legislatif. Semua penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif dengan beberapa metode yang berbeda. Pada penelitian yang dilakukan oleh Esty Ekawati pada tahun 2018 yang berjudul *Keterwakilan Perempuan Pada*

Pemilu Pasca Orde Baru (Ekawati, 2018), beliau menemukan bahwa rendahnya angka keterwakilan perempuan di lembaga legislatif disebabkan oleh: 1) motivasi kandidat perempuan untuk menjadi caleg, 2) budaya patriarki yang masih melekat di masyarakat Indonesia, 3) keterbatasan modal finansial perempuan, dan 4) pragmatisme partai politik. Pada penelitian yang dilakukan oleh Andie Hevriansyah pada tahun 2019 yang berjudul *Hak Politik Keterwakilan Perempuan dalam Sistem Proporsional Representatif pada Pemilu Legislatif* (Hevriansyah, 2021), beliau menemukan bahwa sistem Proporsional Representatif terbuka memberikan kesempatan yang sama untuk tiap kandidat baik pria maupun perempuan, pemberian sanksi kepada partai yang tidak memenuhi syarat minimal 30% keterwakilan perempuan sebagai peserta Pemilu, akan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi keterwakilan perempuan di parlemen. Pada penelitian yang dilakukan oleh Anifatul Kiftiyah pada tahun 2019 yang berjudul *Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia*, beliau menemukan bahwa tujuan kebijakan Undang-undang No. 2 tahun 2008 adalah menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan, menghindari dominasi laki-laki, dan memastikan representasi perempuan dalam politik. Pada penelitian yang dilakukan oleh Choirul Salim pada tahun 2019 yang berjudul *Dinamika Politik Perempuan Dalam Kontestasi Pilkada Di Provinsi Lampung* (Salim, 2019), menemukan bahwa dinamika politik dalam Pilkada Provinsi Lampung sangat terkait dengan pengaruh tokoh-tokoh, strategi komunikasi politik, dan dukungan massa yang mereka miliki. Perempuan yang terlibat dalam dunia politik memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai stereotip yang sering kali melekat pada peran perempuan dalam politik, meskipun dalam beberapa kasus, ada orang yang memilih calon berdasarkan pemberian uang sebagai imbalan. Pada penelitian oleh Muhadam Labolo dkk pada tahun 2019 yang berjudul *Politik Gender dan Keterwakilan Perempuan dalam Pilkada Provinsi Lampung* (Labolo et al., 2019), menemukan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir, Lampung, sebuah daerah yang memiliki budaya patriarkis, telah menyaksikan peningkatan peran perempuan dalam dunia birokrasi, menunjukkan perkembangan positif dalam politik gender. Keberhasilan Chusnunia, yang terpilih sebagai wakil gubernur setelah prestasinya di Lampung Timur, dapat diatribusikan kepada kemampuan komunikasi politik yang efektif, jaringan sosial yang kuat, dan strategi kampanye yang tepat. Kemenangannya memotivasi perempuan lain untuk terlibat dalam politik, meskipun sebagian besar berasal dari kalangan elit atau dinasti politik.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah 1956

Pada penelitian sebelumnya terkait perempuan dalam kontestasi politik baik pada eksekutif maupun legislatif. Semua penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif dengan beberapa metode yang berbeda. Pada penelitian yang dilakukan oleh Esty Ekawati pada tahun 2018, beliau menggunakan metode penelitian pustaka dan wawancara. Pada penelitian yang dilakukan oleh Andie Hevriansyah pada tahun 2019, beliau menggunakan metode yuridis normatif. Pada penelitian yang dilakukan oleh Anifatul Kiftiyah pada tahun 2019, beliau menggunakan metode analisis historis. Pada penelitian yang dilakukan oleh Choirul Salim serta penelitian oleh Muhadam Labolo dkk, keduanya pada tahun 2019 serta menggunakan metode penelitian lapangan atau observasi lapangan.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan. Dari beberapa penelitian yang peneliti uraikan, penelitian yang paling mirip dengan yang peneliti lakukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Choirul Salim serta

penelitian oleh Muhadam Labolo dkk, keduanya pada tahun 2019. Fokus dari kedua penelitian tersebut adalah dinamika pada pada PILKADA Provinsi Lampung, Choirul Salim dari sudut pandang hambatan dan strategi politik sedangkan Muhadam Labolo dari sudut pandang kondisi diskriminatif dan partisipasi perempuan dalam politik. Fokus peneliti dalam penelitian ini adalah mengatasi hambatan keterwakilan perempuan pada kontestasi politik eksekutif di Kota Pangkalpinang.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses kandidasi Endang Kusumawaty dan hambatan keterpilihan perempuan pada Pilkada Kota Pangkalpinang tahun 2018.

II. Metode

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang difokuskan pada pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif melibatkan berbagai cara pendekatan dan hasilnya disajikan dalam bentuk naratif (Yusuf, 2018). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode studi kasus. Studi kasus adalah pendekatan pengumpulan data yang mendalam, terperinci, intensif, holistik, dan sistematis terhadap individu, peristiwa, lingkungan sosial, atau kelompok, dengan menggabungkan berbagai metode dan teknik serta menggunakan banyak sumber informasi untuk memahami bagaimana entitas tersebut beroperasi atau berfungsi dalam konteksnya (Yusuf, 2018).

Peneliti mengumpulkan data dari wawancara terhadap orang-orang disekitar Endang Kusumawaty, dari pemerintah serta dari masyarakat. Selain itu juga peneliti mengumpulkan data dari laporan-laporan dari berbagai sumber baik langsung ke kantor yang bersangkutan maupun data-data yang tersebar di internet.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Proses Kandidasi Endang Kusumawaty pada Pilkada Kota Pangkalpinang 2018

3.1.1. Seleksi Diri

Seleksi diri merupakan tahapan paling awal dari seseorang ketika ingin menjadi seorang calon baik eksekutif maupun legislatif. Seleksi diri merupakan keinginan dari seseorang untuk mencalonkan diri. Seseorang dengan keinginan yang kuat dan didukung dengan latar belakang yang baik, menjadi modal yang baik dalam pencalonan dirinya. Menurut penuturan dari Ferry Firmansyah selaku Wakil Kepala I Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan Daerah (BPOKK-DA) Demokrat Bangka Belitung, Endang Kusumawaty, seorang perempuan asli Pangkalpinang, Bangka Belitung, memiliki latar belakang yang kuat dalam keluarga polisi. Ayahnya, Letkol Pol (Purn) H. Sarman, S.H., adalah mantan Kapolres Pangkalpinang, memberikan fondasi yang kokoh dalam kepemimpinan dan tanggung jawab. Setelah

menyelesaikan pendidikan tingkat SMA di Pangkalpinang, ia merantau ke Bandung untuk menimba ilmu di Universitas Kristen Indonesia.

Endang Kusumawaty kemudian kembali ke daerah kelahirannya untuk mengikuti kontestasi kepala daerah Kota Pangkalpinang 2018. Endang Kusumawaty tidak hanya datang dengan tidak melakukan apa-apa. Dilansir dari Antaranews pada hari Senin, 11 September 2017, diterangkan bahwa, Endang Kusumawaty pernah membuat sebuah kegiatan yang bernama "Kuis Ibu Kite". Kuis Ibu Kite akan mengundi beberapa hadiah seperti smartphone, kompor gas, kipas angin dan dispenser. Pengundian dilakukan di Posko Rumah Aspirasi "Ibu Kite" di Jl. Sekolah, Kelurahan Melintang, Kecamatan Rangkui, Pangkalpinang. Kuis "Ibu Kite" merupakan upaya dari Endang Kusumawaty, yang pada saat itu tengah merencanakan pencalonan sebagai Wali Kota Pangkalpinang pada Pemilihan Walikota (Pilwako) 2018. Tujuan utama dari kuis ini adalah untuk membawa Endang lebih dekat dengan masyarakat Kota Pangkalpinang. Endang Kusumawaty percaya bahwa melalui kegiatan kuis ini, hubungan silaturahmi antara dirinya dan masyarakat dapat diperkuat (Hardi, 2017).

Sepak terjang yang dilakukan oleh Endang Kusumawaty membuahkan hasil yang baik. Hal ini dikarenakan tingkat pengenalan masyarakat terhadap Endang Kusumawaty berada di tingkat tertinggi. Hal ini didasarkan pada hasil survei yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (Y. Laspela, 2018)

3.1.2. Seleksi Partai

Seleksi partai merupakan tahapan dari partai politik untuk memilih siapa calon yang akan mereka usung. Tahapan ini penting karena pada tahap ini partai politik atau koalisinya akan menentukan siapa calon yang akan mereka dukung. Partai atau koalisi biasanya sudah memiliki kriteria-kriteria apa saja untuk memilih calon mereka. Dari wawancara dengan Ferry, tergambar bahwa Partai Demokrat mengakui potensi yang dimiliki Endang Kusumawaty. Proses pendaftarannya sebagai anggota partai dan penerimaan Kartu Tanda Anggota (KTA) merupakan awal dari perjalanan politiknya. Keterlibatan suaminya, Irfan Suryanagara, sebagai Ketua DPRD Jawa Barat memberikan tambahan nilai dalam penilaian Demokrat terhadap Endang Kusumawaty.

Endang Kusumawaty mengalami proses seleksi melalui rapat koalisi partai politik pengusung calon walikota dan wakil walikota. Melalui rapat tersebut, terbentuklah kesepakatan untuk mengusung Endang Kusumawaty berpasangan dengan Ismiryadi, atau yang dikenal dengan sebutan EKSIS. Penentuan pasangan calon ini melibatkan empat partai politik koalisi pengusung Endang Kusumawaty-Ismiryadi, yaitu Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN), yang memiliki total 11 kursi di parlemen pada saat itu. Berdasarkan keterangan dari Ketua DPC PAN, Andi, sebagaimana dilansir oleh Negeri Laskar Pelangi, 12 Desember 2017, diperoleh informasi bahwa pemilihan Endang Kusumawaty-Ismiryadi sudah melalui rapat internal koalisi (I. Laspela, 2017).

Ismiryadi yang dipilih sebagai pasangan Endang Kusumawaty dalam Pilkada Kota Pangkalpinang 2018. Ismiryadi merupakan Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2009-2014. Dengan latar belakang seorang mantan Ketua DPRD, diharapkan mampu menaikkan suara dan elektabilitas dari pasangan Endang Kusumawaty-Ismiryadi karena memang sudah dikenal oleh masyarakat.

Berdasarkan berita yang dimuat di Bangkapos (2018) Endang Kusumawaty, Calon Wali Kota Pangkalpinang, bersama tim kampanyenya terus aktif melakukan kegiatan blusukan sebagai bagian dari strategi kampanye. Salah satu blusukan dilakukan di Kelurahan Lontong Pancur, Kecamatan Pangkalbalam, Pangkalpinang, di mana mereka secara langsung berinteraksi dengan warga setempat. Dalam kesempatan tersebut, Endang Kusumawaty, yang akrab dipanggil Ibu Kite, tidak hanya menyapa warga, tetapi juga mendengarkan aspirasi serta keluhan yang mereka sampaikan.

3.1.3. Seleksi Pemilih

Seleksi pemilih merupakan tahapan penting dalam proses politik, di mana calon-calon akan mengikuti pemilihan dan mengamati hasilnya dengan cermat. Proses seleksi pemilih ini mencerminkan dinamika politik lokal yang kompleks, di mana partai politik memiliki peran kunci dalam pembentukan koalisi dan penentuan dukungan terhadap calon wali kota dan wakil wali kota. Keputusan untuk mengusung Endang Kusumawaty dan Ismiryadi sebagai pasangan calon terpilih merupakan hasil dari negosiasi dan kesepakatan antarpartai politik yang mengambil pertimbangan berbagai faktor, termasuk potensi elektabilitas pasangan tersebut dan kekuatan politik yang dihasilkan dari dukungan partai.

Endang Kusumawaty-Ismiryadi memperhatikan beberapa masalah yang terdapat di Kota Pangkalpinang saat itu. Masalah yang mendapat perhatian oleh Endang Kusumawaty-Ismiryadi yaitu (KPU Pangkalpinang, 2018): 1) Peningkatan sarana prasarana pendidikan. 2) Peningkatan sarana prasarana kesehatan. 3) Pengentasan kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan sosial. 4) Penataan pasar dan pedagang kaki lima (PKL). 5) Penanganan banjir dan sampah. 6) Penanganan kerusakan lingkungan. 7) Pemenuhan air bersih. 8) Pemenuhan kebutuhan aliran listrik. 9) Pemenuhan kebutuhan perumahan. 10) Pemenuhan kebutuhan infrastruktur lalu lintas ekonomi. Dari visi misi dan fokus permasalahan yang diangkat oleh pasangan Endang-Kusumawaty, tidak ada satupun yang fokus untuk membahas permasalahan-permasalahan yang dialami oleh perempuan seperti diskriminasi pada perempuan, kekerasan dalam rumah tangga ataupun seperti kesetaraan dalam kesempatan untuk bekerja. Merujuk pada keterangan dari Lingkar Diskusi Gender Universitas Bangka Belitung dan visi-misi Endang Kusumawaty-Ismiryadi, wajar jika Endang Kusumawaty-Ismiryadi tidak bisa memenangkan pemilih perempuan.

3.2. Hambatan Keterpilihan Perempuan pada Pilkada Kota Pangkalpinang tahun 2018

3.2.1. Endang Kusumawaty Kurang Dikenal oleh Masyarakat Kota Pangkalpinang

Endang Kusumawaty, merupakan calon walikota Pangkalpinang pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018. Ferry Firmansyah selaku Wakil Ketua I BPOKK-DA Demokrat Bangka Belitung menerangkan bahwa Endang Kusumawaty memiliki modal sosial yang baik karena lahir dan besar di Pangkalpinang. Meskipun melanjutkan pendidikan tingginya di Kota Bandung, jejaknya yang terdahulu di Pangkalpinang, termasuk pendidikan hingga tingkat SMA, memberinya panggung yang luas untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan

masyarakat. Sebagai bagian dari Kecamatan Gerunggang, diharapkan daerah ini dapat menjadi "lambung suara" yang signifikan dalam mendapatkan dukungan politik, bukan hanya dari daerah basisnya, tetapi juga dari seluruh wilayah Kota Pangkalpinang.

Ferry Firmansyah, dalam wawancara dengan peneliti, menegaskan bahwa tim Endang Kusumawaty menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kota Pangkalpinang. Mereka tidak hanya memusatkan perhatian pada kelompok atau golongan tertentu, tetapi juga berusaha memperluas cakupan dukungan melalui partisipasi dalam berbagai kegiatan komunitas dan acara sosial. Dengan cara ini, mereka berupaya untuk menjalin hubungan yang kuat dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk melalui kunjungan dan interaksi langsung dengan majelis-majelis ta'lim yang ada di kota tersebut. Kehadiran Endang Kusumawaty di berbagai kegiatan dan forum masyarakat menunjukkan komitmen yang kuat untuk mendekati dan mendengarkan suara rakyat. Dengan demikian, dia tidak hanya diharapkan menjadi wakil bagi Kecamatan Gerunggang, tetapi juga memperjuangkan kepentingan seluruh warga Kota Pangkalpinang.

Pendapat yang berbeda muncul dari Pak Wahidin, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pangkalpinang, terkait dengan profil dan kontribusi Endang Kusumawaty sebagai calon walikota. Menurutnya, Endang Kusumawaty kurang terlihat aktif dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat sebelumnya. Hal ini menciptakan tantangan tersendiri dalam membangun citra dan pengakuan di kalangan masyarakat. Meskipun memiliki latar belakang keluarga yang dikenal masyarakat seperti ayahnya yang merupakan seorang mantan Kapolres Pangkalpinang dan suaminya yang merupakan mantan ketua DPRD Jawa Barat Periode 2009-2014, Pak Wahidin menganggap bahwa hal ini belum cukup sebagai modal untuk mendapatkan dukungan yang signifikan dari masyarakat. Menurutnya, seorang calon walikota seharusnya telah memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat sebelumnya, sehingga namanya dikenal dan diingat oleh pemilih potensial. Kehadiran yang tiba-tiba di kancah politik saat mencalonkan diri sebagai walikota, tanpa jejak kontribusi yang terlihat sebelumnya, menjadi pertimbangan kritis bagi Pak Wahidin.

Upaya tim Endang Kusumawaty dalam menjalankan kampanye yang intensif dan menjangkau seluruh wilayah Kota Pangkalpinang sejalan dengan prinsip "blusukan" yang dilakukan belum bisa sejalan dengan hasil pemilihan. Hal ini tercermin dari capaian suara yang diperoleh di setiap kecamatan hampir seluruhnya melampaui 15%, menunjukkan bahwa masyarakat rata-rata telah mengenali pasangan Endang-Ismiryadi, tetapi memang belum bisa meyakinkan pemilih untuk memilih mereka. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Pak Wahidin selaku Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol Pangkalpinang bahwa hanya dikenal saja belum cukup untuk memenangkan kepercayaan dan dukungan pemilih. "Seorang calon pemimpin juga diharapkan memiliki rekam jejak yang terlihat dan kontribusi nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat".

Dalam wawancara dengan sejumlah mahasiswa dan mahasiswi yang tergabung dalam Lingkar Diskusi Gender Universitas Bangka Belitung. Mereka melihat kehadiran perempuan sebagai calon walikota sebagai langkah yang positif dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam partisipasi politik. Dengan adanya perempuan di posisi pengambil keputusan, suara perempuan diharapkan dapat lebih didengar dan diperhatikan dalam proses pengambilan kebijakan.

Namun, mereka juga menekankan perlunya kehati-hatian dalam menilai calon perempuan tersebut. Pertanyaan mendasar yang diajukan adalah apakah calon tersebut benar-benar mewakili dan peduli terhadap kelompok perempuan yang membutuhkan, seperti

perempuan buruh atau perempuan yang menjadi korban diskriminasi. Mereka menyoroti pentingnya memastikan bahwa calon perempuan tersebut memiliki pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh kelompok perempuan tersebut, seperti kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan atau pembagian kerja yang adil di rumah tangga dan tempat kerja.

Selain itu, mereka juga menekankan bahwa sekadar menjadi perempuan bukanlah jaminan bahwa calon tersebut akan secara otomatis mewakili kepentingan perempuan secara menyeluruh. Penting untuk meninjau rekam jejak dan komitmen calon perempuan dalam mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan hak-hak perempuan, bukan hanya selama kampanye, tetapi juga selama masa jabatan. Mereka menyoroti pentingnya agar calon perempuan tidak menjadi bagian dari sistem yang mempertahankan ketidaksetaraan gender atau bahkan terlibat dalam penindasan terhadap sesama perempuan.

Selanjutnya, mereka juga menyoroti aspek pendidikan calon perempuan. Mereka berpendapat bahwa penting untuk memastikan bahwa calon tersebut berasal dari latar belakang yang mewakili keberagaman masyarakat, bukan hanya dari kalangan yang memiliki privileg seperti anak pejabat atau orang kaya yang hanya meneruskan tradisi politik keluarga mereka. Hal ini penting agar calon perempuan tersebut dapat memahami dan mewakili kepentingan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang rentan dan terpinggirkan. Hal ini juga dapat mempengaruhi minat pemilih untuk memilih calon pemimpinnya.

Selain itu juga, faktor lawan politik juga mempengaruhi minat pemilih untuk memilih seorang calon. Prof. H. Saparudin, M.T., Ph. D yang merupakan calon walikota nomor urut 2 dan H. Maulan Aklil, S.IP, M.Si yang merupakan calon nomor urut 3, pada Pilkada Pangkalpinang 2013 adalah pasangan calon pada pilkada tersebut. Saparudin menjadi calon walikota dan Maulan Aklil menjadi calon wakil walikota. Pada pilkada tersebut, mereka kalah dari pasangan Irwansyah-Sopian dan menempati urutan kedua. Sehingga dengan lawan politik yang sudah memiliki basis yang lebih lama dan juga mereka pernah menjadi pasangan calon walikota dan calon wakil walikota menjadikan fondasi mereka lebih kuat untuk maju dalam kontestasi kepala daerah Pangkalpinang. Dari hasil rekapitulasi Pilkada Pangkalpinang 2018, Saparudin-Edison berhasil memperoleh 33,07% suara dan Maulan Aklil-Sopian berhasil memperoleh 41,59% suara membuktikan bahwa dominasi kedua pasangan calon ini masih sangat kuat di Kota Pangkalpinang.

Kedua pasangan calon Saparudin-Edison dan Maulan Aklil-Sopian sudah melakukan kampanye jauh lebih dulu dibandingkan dengan Endang Kusumawaty-Ismiryadi. Endang Kusumawaty sendiri baru melakukan kampanye pada tahun 2017 pada program “Kuis Ibu Kite”. Ini merupakan kelebihan yang dimiliki oleh pasangan lain, sedangkan Endang Kusumawaty-Ismiryadi harus memulai dari 0 lagi dengan waktu yang jauh lebih lambat.

3.2.2 Budaya Patriarki Masih Ada di Kota Pangkalpinang

Wawancara dengan mahasiswa dan mahasiswi dari Lingkar Diskusi Gender (LDG) Universitas Bangka Belitung menggambarkan pandangan masyarakat terhadap perempuan dalam konteks politik dan ranah publik secara umum. Mereka menyoroti bahwa masih banyak masyarakat yang memandang perempuan sebagai makhluk inferior yang berada satu tingkat di bawah laki-laki. Pandangan ini tercermin dalam keraguan masyarakat terhadap kemampuan perempuan untuk memimpin, yang seringkali dipertanyakan apakah perempuan bisa memimpin dengan efektif. Beberapa orang bahkan beranggapan bahwa ciri khas perempuan,

seperti sifat feminin dan penekanan pada emosi, mungkin tidak sesuai dengan gambaran visual seorang pemimpin yang kuat dan tegas.

Pendapat Pak Wahidin, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang, menyoroti pandangan yang masih mengakar di masyarakat generasi yang lebih tua. Menurutnya, ada persepsi yang menempatkan perempuan dalam peran tradisional di dapur, dengan minimnya pengakuan akan potensi kepemimpinan yang dimiliki perempuan. Hal ini mencerminkan tantangan yang masih dihadapi dalam memperluas wawasan gender di tengah-tengah masyarakat.

Emma Dharmawati, seorang calon legislative perempuan dari Partai Golkar juga menyoroti tantangan lain yang dihadapi oleh calon perempuan, terutama yang memiliki peran rumah tangga dan keluarga. Dalam budaya yang masih menganut patriarki, perempuan seringkali diharapkan untuk membagi fokusnya antara karier politik, keluarga, dan tanggung jawab rumah tangga. Hal ini dapat mengakibatkan pembagian perhatian yang tidak proporsional dan mempengaruhi kinerja politik mereka. Terlebih lagi, dukungan dari lingkungan rumah tangga, terutama dari suami dan keluarga, tidak selalu dapat dipastikan. Beberapa perempuan mungkin menghadapi resistensi atau kurangnya dukungan dari anggota keluarga mereka dalam mengejar karier politik.

Selain itu juga, Pendapat Pak Wahidin, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang, sejalan dengan keterangan dari LDG. Beliau menyoroti pandangan yang masih mengakar di masyarakat generasi yang lebih tua. “Masih ada persepsi yang menempatkan perempuan dalam peran tradisional di dapur, dengan minimnya pengakuan akan potensi kepemimpinan yang dimiliki perempuan”.

Kalangan muda ini digolongkan ke dalam generasi y atau akrab disebut generasi milenial, generasi z dan seterusnya. Sedangkan kalangan yang lebih tua digolongkan sebagai generasi X dan yang lebih senior.

Generasi millennial dikenal sebagai individu yang terampil dan tanggap terhadap perkembangan teknologi. Mereka memiliki kecenderungan untuk mengadopsi teknologi dalam berbagai aspek kehidupan mereka, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan dalam melakukan aktivitas sehari-hari (Sulistyan, 2020)

Tabel 3.1.

Jumlah Penduduk Pangkalpinang berdasarkan Kelompok Umur 2018

Kelompok Umur	Jumlah (Jiwa)
20-24	20.115
25-29	20.100
30-34	18.683
35-39	16.512
40-44	14.857
45-49	12.358

50-54	10.910
>55	21.993

Sumber: BPS Pangkalpinang (2019)

Menurut Badan Pusat Statistik (2020), Generasi Milenial meliputi penduduk yang lahir antara tahun 1981 hingga 1996, telah diidentifikasi sebagai kelompok yang secara luas terbiasa dan terampil dalam mengadopsi teknologi. Pada tahun 2018, penduduk yang lahir pada tahun 1981 telah mencapai usia 37 tahun, menandakan bahwa mereka termasuk dalam kategori generasi milenial yang sudah terbiasa dengan perkembangan teknologi. Wawancara LDG menerangkan bahwa kaum muda, yang termasuk dalam generasi milenial, memiliki pemahaman yang meningkat terhadap kesetaraan gender. Data dari tabel 3.1 menunjukkan bahwa jumlah individu yang muda dan akrab dengan kesetaraan gender ini mencapai 58.898 jiwa, termasuk mereka yang berusia 38 dan 39 tahun. Sebaliknya, populasi generasi X dan kelompok yang lebih tua, yang berusia di atas 40 tahun, memiliki jumlah yang lebih besar, yaitu sekitar 60.118 jiwa. Perbedaan jumlah yang signifikan ini, dengan kelebihan sekitar 11 ribu jiwa pada kelompok yang lebih tua, dapat dijadikan faktor penting mempengaruhi kekalahan dari pasangan calon Endang Kusumawaty-Ismiryadi karena generasi ini dinilai belum familiar dengan konsep kesetaraan gender.

3.2.3. Politik Uang Masih Ada di Kalangan Menengah ke Bawah

Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) sebagai alat untuk memperkuat desentralisasi dan otonomi daerah ternyata masih menghadapi berbagai masalah. Tantangan ini muncul baik pada aspek teknis pelaksanaan, hasil yang diperoleh, maupun kondisi pasca pemilihan. Beberapa masalah yang dihadapi antara lain adalah persaingan yang tidak sehat, kecurangan saat pemungutan dan penghitungan suara di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), praktik politik uang (money politics) menjelang pemilukada, serta potensi konflik yang rentan terjadi setelah pelaksanaan pemilukada (Erviantono, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa di Indonesia secara umum masih sering terjadi politik uang di berbagai daerah, tak terlepas di Kota Pangkalpinang.

Ferry berpendapat bahwa politik saat ini di Kota Pangkalpinang, serta di tempat lainnya, sangat dipengaruhi oleh transaksionalisme. Fenomena ini menandakan bahwa politik menjadi semakin pragmatis, di mana pertukaran dukungan atau manfaat menjadi hal yang umum. Tidak lagi relevan apakah seseorang memiliki kualitas kepemimpinan yang mumpuni atau tidak, tetapi lebih kepada apa yang bisa ditawarkan atau diberikan kepada pihak lain.

Pendapat Fazilia Olga Anjani, seorang calon legislatif dari Partai Demokrat yang telah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) selama lebih dari lima tahun, menerangkan bahwa dalam realitas dalam masyarakat, gender tidak selalu menjadi faktor utama dalam menilai seorang calon pemimpin. Lebih sering, masyarakat cenderung menilai berdasarkan seberapa besar uang yang diberikan oleh calon tersebut. Pandangan Fazilia menggambarkan bahwa politik lokal masih didominasi oleh dinamika transaksional, di mana kehadiran perempuan dalam arena politik tidak selalu mengubah landasan evaluasi masyarakat. Dengan demikian, kendati ada kemajuan dalam memperjuangkan kesetaraan gender, tantangan nyata masih terletak pada upaya mengurangi politik uang dan memperluas wawasan masyarakat akan pentingnya kualitas kepemimpinan yang berbasis pada integritas dan kapasitas, bukan semata-mata pada aspek finansial.

Sejalan dengan itu, Emma Dharmawati, calon legislatif dari Partai Golkar dapil 2 Kota Pangkalpinang, menyoroti beragam hambatan yang dihadapi oleh calon perempuan dalam dunia politik. Salah satu kendala utama yang disoroti adalah ketidakseimbangan dalam kemampuan finansial antara calon perempuan dan calon laki-laki. Perempuan seringkali menghadapi kesulitan dalam memperoleh sumber daya finansial yang cukup kuat untuk bersaing secara efektif dalam kontestasi politik. Selain itu, stereotip yang menggambarkan perempuan kurang "greget" atau kurang memiliki gairah dan semangat yang kuat juga menjadi hambatan dalam membangun citra yang kuat di mata masyarakat.

Tabel 3.2.

Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Kota Pangkalpinang 2018

Golongan Pengeluaran	Persentase
300.000 - 499.999	0,84
500.000 – 749.999	10,88
750.000 – 999.999	23,95
1.000.000 – 1.499.999	32,61
> 1.500.000	31,72

Sumber: BPS Pangkalpinang (2018)

Menurut *World Bank* (2024), pengelompokan masyarakat menurut pengeluaran adalah sebagai berikut:

- Kelas Atas: pengeluaran lebih dari Rp 6.000.000 per orang sebulan
- Kelas Menengah: pengeluaran Rp1.200.000 - Rp6.000.000 per orang sebulan
- Menuju Kelas Menengah: pengeluaran Rp532.000 - Rp1.200.000 per orang sebulan
- Rentan: pengeluaran Rp 354.000 - Rp532.000 per orang sebulan
- Miskin: pengeluaran di bawah angka kemiskinan nasional atau kurang dari Rp 354.000 per orang sebulan

Berdasarkan data pada tabel 3.2, dengan hanya menghitung masyarakat dengan pengeluaran kurang dari Rp1.000.000, penduduk menengah ke bawah berjumlah 35,67% penduduk total Kota Pangkalpinang. Dalam konteks politik transaksional yang dijelaskan oleh Ferry, Fazilia, dan Emma memang berdampak pada pencalonan Endang Kusumawaty-Ismiryadi. Tetapi memang berdasarkan data yang ada, dampaknya tidak begitu signifikan tetapi tetap berpengaruh terhadap hasil Pilkada Pangkalpinang 2018 karena angka 35,67% bukanlah angka yang kecil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai sumber, teridentifikasi tiga hambatan utama yang menjadi faktor penyebab kekalahan bagi pasangan calon Endang Kusumawaty-Ismiryadi dalam kontestasi Pemilihan Wali Kota Pangkalpinang. Pertama, pasangan tersebut masih kurang dikenal secara luas oleh masyarakat Kota Pangkalpinang.

Kedua, budaya patriarki yang masih kental di sebagian masyarakat Pangkalpinang turut menjadi hambatan dalam perjalanan politik pasangan Endang-Ismiryadi. Budaya ini mungkin mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kemampuan dan kualifikasi seorang wanita dalam memimpin. Meskipun Endang Kusumawaty memiliki latar belakang dan kapabilitas yang kuat, budaya patriarki dapat menghalangi penerimaan publik terhadap kepemimpinan wanita.

Ketiga, adanya politik uang yang masih memengaruhi sebagian masyarakat, menjadi hambatan serius bagi pasangan Endang-Ismiryadi yang diakui oleh Ferry memiliki keterbatasan dalam kekuatan finansial. Meskipun memiliki potensi dan kualifikasi yang kuat, keterbatasan sumber daya finansial dapat menjadi kendala dalam mengimbangi upaya politik uang yang dilakukan oleh pasangan lainnya. Dengan demikian, ketiga hambatan tersebut secara bersama-sama memperumit perjalanan politik pasangan calon Endang Kusumawaty-Ismiryadi dalam Pemilihan Wali Kota Pangkalpinang 2018.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian terkait keterpilihan perempuan pada kontestasi pemilihan kepala daerah di Kota Pangkalpinang memiliki persamaan dan perbedaan terhadap penelitian sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Esty Ekawaty pada tahun 2018 dengan judul *Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Pasca Orde Baru*, meneliti keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif, sedangkan dalam penelitian ini keterpilihan perempuan pada lembaga eksekutif. Walaupun sama-sama meneliti perempuan pada kancah politik, tetapi memiliki perbedaan pada lembaga yang diteliti. Penelitian oleh Esty Ekawaty dan penelitian yang peneliti lakukan menghasilkan kesimpulan yang relatif sama yaitu budaya patriarki yang masih kuat pada masyarakat dan politik uang yang masih terjadi. Sebagai tambahan, pada penelitian ini, calon perempuan yaitu Endang Kusumawaty kurang dikenal oleh masyarakat Kota Pangkalpinang. Selain itu, pada penelitian yang dilakukan oleh Choirul Salim pada tahun 2019 yang berjudul *Dinamika Politik Perempuan Dalam Kontestasi Pilkada Di Provinsi Lampung*, merupakan penelitian yang paling mirip dengan dengan penelitian ini. Perbedaannya adalah selain meneliti di tempat yang berbeda, terdapat perbedaan dari hasil yang didapatkan. Choirul Salim menyimpulkan bahwa perempuan yang terlibat dalam dunia politik mampu mengatasi berbagai stereotip yang melekat pada perempuan, sedangkan di Kota Pangkalpinang, calon perempuan belum mampu untuk mengatasi hal tersebut karena Endang Kusumawaty kurang dikenal oleh masyarakat. Politik uang masih menjadi penyebab yang sama.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis penelitian terkait proses pemilihan dan hambatan yang dihadapi oleh Endang-Ismiryadi, maka dapat disimpulkan yaitu: 1) Pada proses seleksi diri, Endang Kusumawaty memiliki motivasi diri untuk menjadi walikota Pangkalpinang 2018 karena berasal dari pangkalpinang, merasa memiliki latar belakang keluarga yang berpengaruh. Kemudian, pada seleksi partai, Endang Kusumawaty merupakan kader utama Partai Demokrat. Selain itu juga dengan mempertimbangkan latar belakang keluarga, sehingga Demokrat dan 3

partai koalisi lainnya sepakat untuk mengukung Endang Kusumawaty berpasangan dengan Ismiryadi . Pada seleksi pemilih, Endang Kusumawaty-Ismiryadi hanya meraih 16,76% suara, bahkan di Kecamatan Gerunggang hanya meraup 16,1% suara. Jauh dari yang diharapkan. 2) Ketidakterpilihan Endang-Ismiryadi diakibatkan oleh 3 faktor, antara lain: Endang-Kusumawaty kurang dikenal oleh masyarakat Kota Pangkalpinang, budaya patriarki yang masih kuat di sebagian kalangan masyarakat Kota Pangkalpinang dan politik uang yang masih terjadi di Kota Pangkalpinang

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu tidak bisa mewawancarai langsung Endang Kusumawaty karena yang bersangkutan sedang terkendala masalah sehingga peneliti hanya bisa menggapai orang-orang disekitar beliau. Penelitian ini juga kurang merepresentasikan pendapat masyarakat karena hanya mewawancarai mahasiswa-mahasiswi dari Lingkar Diskusi Gender Universitas Bangka Belitung

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan di lokasi serupa terkait dengan hambatan keterpilihan perempuan pada politik lokal di Kota Pangkalpinang untuk menemukan hasil yang lebih mendalam

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama pada Partai Demokrat Bangka Belitung beserta beberapa kadernya yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian. Selain itu juga kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang, LDG Universitas Bangka Belitung serta pihak-pihak terkait lainnya yang telah membantu dalam penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Aprionis. (2013). *KPU Pangkalpinang Gelar Pleno Rekapitulasi Pilkada*. <https://babel.antaranews.com/berita/4932/kpu-pangkalpinang-gelar-pleno-rekapitulasi-pilkada>
- Bangkapos. (2018). *Ibu Kite Pastikan Tetap Turun Blusukan*. [Bangkapos.Com.](https://bangka.tribunnews.com/2018/04/11/ibu-kite-pastikan-tetap-turun-blusukan)
- Ekawati, E. (2018). Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Pasca Orde Baru. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 16(1), 67. <https://doi.org/10.14421/musawa.2017.161.67-80>
- Erviantono, T. (2019). *Budaya politik, uang, dan pilkada*. 60–68.
- Hardi, T. M. (2017). *Sahabat Endang: Kuis “Ibu Kite” Diundi Selasa*. [Antara.](https://babel.antaranews.com/berita/64140/sahabat-endang-kuis-ibu-kite-diundi-selasa)
- Hevriansyah, A. (2021). Hak Politik Keterwakilan Perempuan dalam Sistem Proporsional Representatif pada Pemilu Legislatif. *Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi*, 1(1), h 67-85. <http://jurnal.banten.bawaslu.go.id/index.php/awasia/article/view/41>
- Labolo, M., Djaenuri, M. A., Ilham, T., & Fadhilah, H. A. (2019). Politik Gender dan Keterwakilan Perempuan Dalam Pilkada Provinsi Lampung. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).

- Laspela, I. (2017). *Partai Pengusung “Ibu Kite” Sepakat Eksis Maju Pilwako*. Pt Cakrawala Babel Media. <https://negerilaskarpelangi.com/2017/12/12/partai-pengusung-ibu-kite-sepakat-eksis-maju-pilwako/>
- Laspela, Y. (2018). *Survey Nusa Politica, Elektabilitas Eksis 35,8 Persen*. Pt Cakrawala Babel Media. <https://negerilaskarpelangi.com/2018/06/04/survey-nusa-politica-elektabilitas-eksis-358-persen/>
- Pangkalpinang, B. P. S. K. (2018). *Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Kota Pangkalpinang (Persen), 2018*. <https://pangkalpinangkota.bps.go.id/indicator/5/193/2/persentase-penduduk-menurut-golongan-pengeluaran-per-kapita-sebulan-di-kota-pangkalpinang.html>
- Pangkalpinang, B. P. S. K. (2020). *Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur (Jiwa), 2018-2020*. <https://pangkalpinangkota.bps.go.id/indicator/12/71/1/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur.html>
- Pangkalpinang, K. P. U. K. (2018). *Paparan Visi, Misi dan Program Kerja Endang Kusumawaty-Ismiryadi*.
- Salim, C. (2019). *Dinamika Politik Perempuan Dalam Kontestasi Pilkada Di Provinsi Lampung*. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 03(2), 287–302.
- Statistik, B. P. (2020). *Jumlah Penduduk menurut Wilayah, Klasifikasi Generasi, dan Jenis Kelamin, INDONESIA, 2020*. Badan Pusat Statistik. <https://sensus.bps.go.id/topik/tabular/sp2020/2/0/0>
- Sulistiyawan, B. (2020). *Generasi Millennial Sumber Ide*. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13270/Generasi-Millennial-Sumber-Ide.html>
- The World Bank in Middle Income Countries*. (2024). The World Bank. <https://www.worldbank.org/en/country/mic/overview>
- Yusuf, A. M. (2018). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan (Pertama)*. Prenadamedia Group.